

Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kecamatan Tampan Pekanbaru

Nur Ahmad Fajri¹ Syapril Abdullah²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
nurahmadfajri@student.uir.ac.id syaprilabdullah@soc.uir.ac.id

Received : August 07, 2024;

Accepted : 10 August 2024

Abstract

Pekanbaru City Civil Service Police Unit in government affairs in the field of peace and public order as well as community protection in the effort to enforce the regulation of billboards, this has not been done to the fullest so billboards appear to still be in violation of the established rules. Implementation of the achievement of the duties of the Pekanbaru City Civil Service Police Unit in Ordering the Billboard through consistency, transparency, accountability, fairness, participation, evektivness and efficiency. The purpose of this study was to find out the role of the civil service police unit and its evaluation of the publication of advertisements in Pekanbaru city. The research method used is a quantitative method. Research results of consistency indicators in the moderately implemented category, with a percentage value of 58%. The tranparency indicator in the shave category was achieved with a percentage value of 84%. The accountability indicator is in the moderately implemented category with a value of 54%. The justice indicator in the category is quite implemented with a percentage value of 55.5%, The participation indicator in the category is quite implementef with a percentage value of 46%, The effectiveness indicator in the category is quite implemented with a percentage value of 56%, The efficiency indicator is quite successful with a value of 56%.

Keywords: *Evaluation, Policy, Billboards*

Abstrak

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat antara lain upaya penegak peraturan penertiban reklame hal ini belum terlaksana dengan maksimal sehingga reklame terlihat masih banyak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pencapaian tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam Penertiban Reklame melalui konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, partisipasi, efektivitas dan efisiensi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja di evaluasi dalam penerbitan iklan di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian indikator Konsistensi dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai persentase 58%. indikator ransparansi dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai persentase 84%. indikator akuntabilitas dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai persentase 54%. indikator keadilan evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai persentase 55,6%. indikator partisipasi dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai persentase 46%. indikator efektivitas katagori cukup terlaksana, dengan nilai persentase 56% indikator efisiensi katagori cukup terlaksana, dengan nilai persentase 56%.

Kata Kunci : *Evaluasi, Kebijakan, Reklame.*

Pendahuluan

Pada era globalisasi tersebut semakin menampakkan kepentingannya tatkala otonomi melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin terbuka lebar. Pada keadaan ini semua sektor lini pemerintahan sangat dibutuhkan dalam hal menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik atau apa yang dikenal dengan istilah *good governance*. Salah satu lembaga yang sangat berperan dalam mendukung terciptanya prinsip pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintahan Daerah dalam Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2010 tentang pedoman pelaporan satuan polisi pamong praja bahwa Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai prangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sebagai pelaksana tugas desentralisasi.

Otonomi daerah dalam pengembangan kemajuan daerah pelaksanaan otonom dimana sumber penerimaan daerah antara lain Pendapat Asli Daerah, dana perimbangan, dan penerimaan daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yaitu dari pajak Reklame atau Iklan. Keberadaan reklame atau iklan ini terdapat di jalan-jalan dan pusat kegiatan masyarakat yang masih masuk dalam wilayah administrasi suatu daerah. Bentuk reklame atau iklan tersebut berupa baliho, spanduk, neon sign, dan umbul-umbul.

Dalam menyikapi ini perlunya pengawasan penertiban oleh aparat pemerintah daerah dikarenakan masih ditemui reklame yang memadati ruang kota hal ini dikarenakan banyaknya reklame yang tidak memiliki izin berdiri sesuai peraturan yang ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja telah diberikan wewenang dan tugas untuk mengawal dan menegakkan perda, wewenang dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Dengan adanya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebagai regulasi penertiban dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang bersifat umum ini dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau ini memerlukan aparatur daerah yang memiliki kualitas dan kuantitas yang baik didalam melaksanakan tugas yang dibebankan padanya. Satpol PP sebagai pengaman penertiban reklame di Kota Pekanbaru dimana ditetapkan sebagai menjalankan perda. Hal ini dalam penerbitan reklame didasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Reklame, namun belum efektif penerapan perda terhadap kepemilikan reklame karena masih banyaknya terlihat papan reklame yang belum memiliki izin dan habis masa izin.

Reklame atau iklan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan yang dikemas dengan kata-kata dan gambar yang menarik untuk membuatnya laku dipasaran. Reklame sekarang menjadi wadah berkomunikasi yang sangat berguna bagi produsen dan konsumen. Karena fungsinya sebagai cara promosi lainnya untuk menyampaikan pesan kepada konsumen, sistem komunikasi ini sangat penting untuk keberhasilan perusahaan dalam memasarkan barang dan jasa mereka.

Diketahui bahwasanya Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang berbentuk spanduk, umbul-umbul yang berisikan pesan atau pemberitahuan iklan yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya ditunjukkan untuk komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa dalam menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa.

Menurut pasal 7 ayat 1, "setiap penyelenggaraan reklame dalam wilayah Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh pemilik atau penyelenggara atau kuasanya, wajib memiliki izin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk". Pelaksanaan reklame mencakup berbagai kegiatan dan kontrol, termasuk penjadwalan, jenis, perizinan, penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban iklan untuk memastikan pemanfaatan ruang kota yang serasi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Reklame.

Ketentuan Umum:

1. Nama, objek, subjek dan wajib pajak
2. Legalitas pengenaan dan tarif pajak
3. prosedur pemungutan, wilayah pemungutan, masa dan perhitungan pajak.
4. Surat pemberitahuan pajak daerah dan tata cara penetapan pajak
5. Penyelenggaraan reklame
6. Prosedur pembayaran
7. Prosedur penagihan pajak
8. Prosedur pengurangan dan pembebasan pajak
9. Prosedur pembetulan, pembatalan, pengurangan sanksi administrasi
10. Keberatan dan banding
11. Batas waktu penagihan
12. Penilaian /Pengawasan
13. Ketetapan penyidikan dan sanksi
14. Insentif pemungutan
15. Penyelidikan
16. Hukum administrasi
17. Ketetapan penutup

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 tahun 2013 mengenai Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru mengatur jenis reklame sebagai berikut:

- a. Reklame Megatron
- b. Reklame papan atau billboard
- c. Reklame Baliho
- d. Reklame berjalan
- e. Reklame udara
- f. Reklame suara
- g. Reklame slide

- h. Pengenal usaha atau merek usaha
- i. Reklame mural
- j. Jembatan penyebrangan orang (JPO)

Kemudian dalam peraturan kawasan reklame diatur dalam pasal 3 yang berbunyi:

1. Pengelompokan kawasan atau area reklame di Kota Pekanbaru dibagi 3 kategori:
 - a. Area bebas reklame
 - b. Area reklame terbatas
 - c. Area reklame umum
2. Area bebas reklame ialah area yang tidak diperbolehkan dipasang reklame
3. Area reklame terbatas ialah area yang mengizinkan pemasangan reklame dengan pengaturan tertentu
4. Area reklame umum ialah diluar area bebas reklame dan area reklame terbatas

Menurut Pasal 1 Ayat 19 dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru, Reklame dibuat oleh individu atau organisasi baik atas nama mereka sendiri maupun atas nama orang lain atau pihak yang bertanggung jawab atas iklan tersebut. Untuk memastikan penyelenggaraan reklame yang sesuai dengan PERDA, Satpol PP menetapkan kebijakan. Selain memberikan pelatihan kepada pemilik iklan, Satpol PP juga memiliki kebijakan guna memberikan sanksi sesuai dengan peruntukannya terhadap pelanggaran reklame.

Berdasarkan penjelasan diatas dimana kebijakan Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban reklame demi tercapainya Penyelenggaraan Reklame yang didasarkan ketentuan peraturan yang ditetapkan meliputi :

- a. Pembinaan terhadap kepemilikan reklame.
- b. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran reklame sesuai dengan peruntukannya
- c. Pengawasan diruas jalan umum.

Pelanggaran reklame yang umumnya sering terjadi dimana pemasangan reklame liar atau tidak memiliki izin, masa perijinan sudah habis, dan ditempatkan pada lokasi-lokasi yang dilarang. Dalam upaya Penertiban reklame, Satpol PP secara prosedur menyurati pemilik untuk membongkar sendiri billboard atau reklame yang telah dinyatakan melanggar. Surat dikirimkan tiga kali dengan durasi waktu masing-masing selama 7 hari kerja. Apabila tidak diindahkan oleh pemilik, maka petugas Satpol PP langsung turun untuk membongkar reklame atau billboard bermasalah tersebut. Melakukan pembongkaran, Satpol PP dilengkapi dengan alat las dan tabung gas. Umumnya pembongkaran dilakukan pada malam hari untuk menghindari kemacetan yang ditimbulkan saat pembongkaran. Waktu pembongkaran pun bervariasi, disesuaikan dengan besar billboard atau reklame. Seluruh besi-besi reklmae yang dibongkar oleh Satpol PP diamankan di gudang Satpol PP untuk selanjutnya akan dilelang sebagai asset daerah.

Adapun Berikut dapat diketahui jumlah reklame berdiri yang tidak memiliki izin, tidak memiliki izin serta habis masa izin berlaku di Kota pekanbaru tahun 2020-2022 sebagai berikut:

Berdasarkan tabel diatas dimana jumlah penertiban reklame berdasarkan kepemilikan izin, tidak memiliki izin, habis masa izin berlaku di Kota Pekanbaru tahun 2020-2022 dengan jumlah semakin tahun semakin meningkat hal ini dapat dilihat mendirikan reklame terbesar pada tahun 2022, dimana kepemilikan izin reklame sebanyak 971, tidak memiliki izin sebanyak 1272 dan habis masa izin berlaku sebanyak 837 reklame.

Pertiban yang telah dilaksanakan Satpol PP sebagai efek jera yang diberikan terhadap kepemilikan reklame dengan menyita reklame yang telah melanggar aturan dan segera diamankan agar bagi kepemilik reklame datang untuk menjemput serta menerima surat tegoran dari Satpol PP.

Diketahui jumlah reklame yang ada dikota pekanbaru tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dimana semakin tahun semakin jumlah reklame yang tidak memiliki izin berdiri. Adapun Jumlah total Baleho/Reklame yang ditertibkan meliputi tahun 2020 sebanyak 91 reklame yang diamankan di Mako, 33 yang diambil pemilik sedangkan tahun 2021 sebanyak 571 diamankan di Mako serta pada tahun 2022 sebanyak 1.737 memiliki izin dan Jumlah total yang ditertibkan sebanyak sebanyak 2.109. diamankan di Mako dan yang diambil pemilik sebanyak 372. Berdasarkan tabel diatas perlunya Satuan Polisi Pamong praja lebih efektif lagi dalam melaksanakan tugasnya agar tidak terjadinya reklame yang berdiri dengan sendirinya tanpa adanya izin yang diberikan sehingga tidak mengurangi pendapatan asli daerah serta memberikan saksi yang tegas terhadap kepemilikan reklame yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku.

Secara hukum, operasi iklan di Kota Pekanbaru umumnya dan Kecamatan Tampan khususnya telah diatur sesuai dengan standar operasional pemberian izin iklan. Keseluruhan aturannya jelas, mulai dari cara pemohon penyelenggara reklame meminta izin sendiri hingga syarat administrasi. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru memiliki peraturan perundang-undangan dan teknis yang rinci untuk semua itu.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, terdapat 88 unit reklame bisnis, sebagian besar di antaranya tidak mempunyai izin dan menunggak pajak. Sementara itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Pekanbaru mendapati 77 iklan/reklame yang tidak berizin. Bahkan, 55 dari 77 iklan yang tidak memiliki izin itu terletak tegak di tepi jalan. Selain tidak mempunyai izin, DPM-PTSP Kota Pekanbaru akan meminta owner reklame agar segera meninggalkan bahu jalan. Menurut DPMPTSP Kota Pekanbaru, ada hampir 400 papan reklame berizin di kota Bertuah. Ada peningkatan 50 titik pada awal tahun 2019 dan total 394 papan reklame berizin. DPMPTSP Kota Pekanbaru, tahun 2023.

Karena reklame yang tidak memiliki izin terus terjadi, pemerintah daerah harus mengawasi dan menertibkannya. Satpol PP ialah suatu lembaga yang memainkan peranan terpenting didalam memastikan prinsip tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Satpol PP dibentuk sebagai perangkat pemerintahan daerah dengan tugas utama menegakkan

PERDA. Selain itu, Satpol PP juga mempunyai wewenang dan fungsi guna menjaga keamanan.

Dalam melakukan penertiban tiang reklame, Satpol PP melakukan persiapan tertentu sebelum melakukan penertiban, termasuk memberikan beberapa teguran. Pertama, teguran diberikan kepada individu atau badan hukum yang mengusik ketertiban. Jika teguran pertama tidak diindahkan dalam waktu tiga hari, teguran kedua diberikan. Jika teguran kedua juga tidak diindahkan dalam waktu 3 hari, teguran yang ketiga pun diberikan. Jika teguran pertama, kedua, dan ketiga tidak juga diindahkan, teguran terakhir dilakukan secara paksa oleh Satpol PP.

Menurut penjelasan di atas, masih ada masalah dengan penanganan reklame oleh Satpol PP. Tugasnya untuk menjaga reklame tertib di Kota Pekanbaru umumnya dan Kecamatan Tampan khususnya belum terpenuhi dengan baik, karena banyak reklame yang tidak berizin dan kadaluarsa izinnya. Selain itu, masih belum diterbitkannya sanksi yang jelas terhadap mereka yang memiliki reklame tersebut.

Sebagai hasil dari observasi penelitian, berikut adalah beberapa fenomena yang terjadi saat Satpol PP menjaga ketertiban reklame di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yaitu, Pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal penertiban reklame tidak konsisten. Hal ini ditunjukkan oleh keberadaan reklame ilegal yang tidak memiliki izi, Masih ditemukan reklame bisnis tidak memiliki izin yang masih terpasang di tempat yang dilarang, seperti di bahu jalan, dan Jumlah iklan yang tidak berizin terus meningkat di Kota Pekanbaru pada tahun 2022 menunjukkan bahwa upaya penertiban iklan masih kurang efektif.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis survey deskriptif ialah jenis penelitian yang menjabarkan variabel yang diteliti dan menggunakan metode kuantitatif, yaitu memberikan presentasi sebelum mencapai kesimpulan dan memberikan rekomendasi. Oleh karena itu, Penelitian survei lengkap menggunakan kuesioner sebagai alat utama pengumpulan data, dan melibatkan pengambilan sampel dari setiap demografi. Data ini akan digunakan oleh peneliti untuk membuat kumpulan pertanyaan kuesioner yang akan dibagikan kepada kelompok sasaran mereka.

Penelitian ini dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, khususnya bagian yang menangani penertiban reklame. Penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa penertiban reklame di Kota Pekanbaru masih kurang efektif karena banyaknya reklame tanpa izin dan reklame yang izinnya sudah habis namun terus beredar.

Pada penelitian ini yang menjadi sampel penelitian adalah

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan populasi, maka untuk menentukan populasi dan sampel, pada Petugas Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat yang digunakan penarikan sensus karena jumlah populasi tidak terlalu besar. Sehingga dapat diketahui jumlah sampel penelitian berjumlah 10 sampel.

Sedangkan terhadap Kepemilikan reklame yang Tidak memiliki izin, Habis Masa izin berlaku dengan menggunakan teknik Purposive Sampling yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan suatu tujuan dan pertimbangan tertentu yang mana pertimbangan penulis ialah Kepemilikan Reklame berjumlah 35 sampel.

Hasil dan Pembahasan

Untuk mengetahui Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam penertiban reklame melalui indikator: Konsistensi, Transparansi, Akuntabilitas, Keadilan, Partisipasi, Efektivitas dan Efisiensi, sebagai berikut:

Konsistensi

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai konsistensi melalui Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame termasuk kepada kategori cukup terlaksana dengan nilai 52 atau sebesar 58% dengan alasan bahwa kegiatan sosialisasi oleh Satpol PP terkait peraturan izin reklame yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Reklame dengan tujuan agar masyarakat mengetahui setiap reklame diwajibkan pajak, akan tetapi sosialisasi yang dilaksanakan Satpol PP belum terlaksana secara merata sehingga masih banyak warga yang belum mengetahui setiap reklame yang berdiri di Kota Pekanbaru Wajib Pajak, serta kurangnya pengawasan yang dilakukan Satpol PP di ruas jalan Kota Pekanbaru terutama penetapan waktu pengawasan sehingga masih ada ditemui reklame yang melanggar aturan yang ditetapkan. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Penetapan Peraturan, Sosialisasi wajib pajak Reklame, Pengawasan Reklame.

Transparansi

Dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai transparansi melalui pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru termasuk kepada kategori cukup terlaksana yakni dengan total nilai 52 atau sebesar 58% dengan alasan bahwa kegiatan sosialisasi oleh Satpol PP terkait peraturan izin reklame yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Reklame dengan tujuan agar masyarakat mengetahui setiap reklame diwajibkan pajak, akan tetapi sosialisasi yang dilaksanakan Satpol PP belum terlaksana secara merata.

Akuntabilitas

Semua tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik harus memiliki pertanggungjawaban administratif dan substantif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan itu guna mengetahui pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu:

- a. Kerjasama antara atasan dan bawahan
- b. Pendataan terhadap reklame
- c. Pendataan terhadap kepemilikan Reklame

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai akuntabilitas melalui pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam penertiban reklame termasuk kepada kategori cukup terlaksana yakni dengan total nilai 73 atau sebesar 54% dengan alasan bahwa kegiatan sosialisasi oleh Satpol PP terkait peraturan izin reklame yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Reklame dengan tujuan agar masyarakat mengetahui setiap reklame diwajibkan pajak, akan tetapi sosialisasi yang dilaksanakan Satpol PP belum terlaksana secara merata.

Keadilan

Kualitas pelayanan yang diberikan kepada kelompok sasaran tidak dipengaruhi oleh ras, agama, golongan, status sosial, atau karakteristik lainnya. Keadilan dalam kebijakan publik diciptakan dalam aktivitas pelayanan yang tidak berepihakan secara sepihak. Keadilan secara umum dapat dipahami sebagai kebaikan, kebajikan, dan kebenaran, yang mengikat antara anggota masyarakat untuk mewujudkan keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban.

Sejalan dengan itu guna mengetahui keadilan pelaksanaan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

- a. Melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku
- b. Memberikan sanksi kepada semua pengusaha reklame yang melanggar aturan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai keadilan melalui evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru termasuk kepada kategori cukup terlaksana yakni dengan total nilai 50 atau sebesar 55,6%.

Partisipasi

Partisipasi masyarakat adalah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Partisipasi masyarakat akan membantu evaluasi dan pengendalian kinerja pemerintah dan dapat mengurangi penyalahgunaan wewenang. Karena partisipasi masyarakat membutuhkan pengawasan dan aspirasi, keberhasilan implementasi kebijakan publik bergantung pada partisipasi masyarakat. Di sini, pengawasan yang dimaksud meliputi pengawasan legislatif atas eksekutif.

Sejalan dengan itu guna mengetahui partisipasi evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu:

- a. Penetapan penertiban Reklame
- b. Pemberian Himbauan
- c. Pencopotan Reklame yang melanggar peraturan

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai partisipasi melalui evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru termasuk kepada kategori cukup terlaksana yakni dengan total nilai persentase sebesar 46%.

Efektivitas

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan terarahnya kebijakan yang dibuat sesuai dengan tujuan dan fungsinya dalam evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam penertiban Reklame tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui efektivitas Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu:

- a. Penetapan Peraturan
- b. Sosialisasi wajib pajak Reklame.
- c. Pengawasan Reklame.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Efektivitas melalui Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dalam katagori cukup terlaksana, katagori cukup terlaksana dengan nilai responden 74 atau 56% dengan alasan, bahwa kegiatan sosialisasi oleh Satpol PP terkait peraturan izin reklame yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Reklame dengan tujuan agar masyarakat mengetahui setiap reklame diwajibkan pajak, akan tetapi sosialisasi yang dilaksanakan Satpol PP belum terlaksana secara merata sehingga masih banyak warga yang belum mengetahui setiap reklame yang berdiri di Kota Pekanbaru Wajib Pajak, serta kurangnya pengawasan yang dilakukan Satpol PP di ruas jalan Kota pekanbaru terutama penetapan waktu pengawasan sehingga masih ada ditemui reklame yang melanggar aturan yang ditetapkan.

Efisiensi

Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada yang berdasarkan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Dengan pengertian efisiensi seperti itu maka dalam Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui efisiensi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Pembinaan terhadap kepemilikan Reklame.
2. Pendataan reklame.
3. Penertiban titik lokasi reklame.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai efisiensi Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Reklame dalam katagori cukup terlaksana, katagori cukup terlaksana dengan nilai keseluruhan responden 75 atau 56% dengan alasan, Pelaksanaan penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan pembinaan terhadap kepemilikan reklame akan tetapi terlihat pembeinaan yang diberikan hanya sebatas bagi reklame yang memiliki izin dan terkena razia melainkan bukan bagi setiap kepemilikan

reklame yang ada dikota pecan baru, dan pendataan reklame dinilai belum merata melainkan pendataan diberikan bagi reklame yang memiliki izin dan terkena razia sehingga bayar reklame yang belum terdata berdiri begitu saja, serta kurangnya upaya satpo PP didalam penertiban titik lokasi berdirinya reklame sehingga banyak reklame yang berdiri tidak tepat sasaran sesuai denganaturan yang ada.

Berdasarkan rekapitulasi data evaluasi tugas Satpol PP dalam penertiban reklame di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP cukup terlaksana dengan persentase 54%.

Kesimpulan

1. Konsistensi evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai persentase 58%.
2. Transparansi evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai persentase 58%.
3. Akuntabilitas evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai persentase 54%
4. Keadilan evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai persentase 55,6%.
5. Partisipasi evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai persentase 47,4%.
6. Efektivitas evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai persentase 56%
7. Efisiensi evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai persentase 56%.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

- Agustino, L. (2014). Dasar- Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Andry, H. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Anggara, S. (2012). Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep,Teori,dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hasibuan, M. S. (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, M. S. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi Ketujuh Belas. Jakarta:

Bumi Aksara.

- Keban, Y. T. (2014). Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik Konsep,Teori,dan Isu Edisi Ketiga. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Marihot, P. Siahaan (2005). Pajak Daerah & Distribusi Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Agustino, L. (2014). Dasar- Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Andry, H. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Anggara, S. (2012). Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep,Teori,dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hasibuan, M. S. (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, M. S. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi Ketujuh Belas. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban, Y. T. (2014). Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik Konsep,Teori,dan Isu Edisi Ketiga. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Marihot, P. Siahaan (2005). Pajak Daerah & Distribusi Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mustopadijaja, AR. (2003). Sankri buku 1 Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara.Jakarta: Gunung Agung.
- Nawawi, I. (2013). Public Policy,Analisis,Strategi Advokasi Teori dan Praktek. Surabaya: PNM.
- Nurcholis, H. (2007). Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah . Jakarta: PT Grasindo.
- Pasalong, H. (2010). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Penyusun, T. (2013). Buku Pedoman Penulisan Badan Penerbit Fisipol. Pekanbaru: UIR .
- Simamora, H. (2004). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: STIE YPKN.
- Sinambela, L. P. (2014). Reformasi Pelayanan Publik " Teori, Kebijakan,dan Implementasi". Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sinambela, L. P. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2007). Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2015). Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Sule, E. T., & Saefullah, K. (2010). Pengantar Manajemen. Jakarta: Kencana.
- Sulistiyani, A. T., & Rosidah. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia Pendekatan Teoritik dan Praktik Untuk Organisasi Publik. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Syafiie, I. K. (2010). Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Syafri, W. (2012). Studi Tentang Administrasi Publik. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Tangkilisan, H. N. (2003). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balairung.
- Torang, S. (2014). *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo. (2013). *Perilaku Dalam Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarno, B. (2002). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Wirawan. (2011). *Evaluasi (Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zulkifli. (2005). *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.
- Zulkifli. (2009). *Fungsi- Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.
- Zulkifli, & Yogia, M. A. (2014). *Fungsi- Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JLAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya

People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.

Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.

Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.

Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.

Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.

Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.

Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.

Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.

Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.

Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).

Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.

Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).

Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.

Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.

- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi*

Publik, 5(2), 1180-1192.

- Nurmasari, N., Komalasari, E., Mulianto, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota

Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.

- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2),

- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang

Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.

- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.
- Hardianto (2013). Evaluasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan Dalam Penertiban Reklame di Jalan Umum.
- Iwan Setiadi (2010). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanganan Ketertiban Reklame di Kabupaten Indragiri Hilir.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal*

Mandala Pengabdian Masyarakat, 3(2), 231-237

Saragih (2015). Implementasi Penertiban Reklame Di Kota Dumai.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 tahun 2013 Tentang penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru.

Awlya Masyanti. 2020. Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kota Pekanbaru.

Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa Pekanbaru; Badan Penerbit Fisipol UIR.